

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori yang akan mendasari penelitian ini. Pada pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami secara mendalam untuk memecahkan permasalahan yang ada serta akan dibahas mengenai studi terkait dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2008), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi yang perlu dicapai perlu dihitung adalah pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu harga berlaku ditahun dasar yang dipilih. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian suatu negara.

Menurut Arsyad (2010), pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan pada output (barang dan jasa) masyarakat dengan semakin bertambah banyaknya jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan pada proses produksi, dengan tanpa adanya perubahan pada teknologi yang digunakan produksi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi pusat perhatian dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara berkembang. Indonesia

merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berjuang dalam meningkatkan pertumbuhannya. Secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai sebuah peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan perekonomian dalam produksi barang dan jasa.

Menurut Sukirno (2011), pertumbuhan ekonomi adalah sebagai sebuah perkembangan dalam kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan output (barang dan jasa) pada kegiatan produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran pada masyarakat meningkat. Berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi diberbagai negara dapat diartikan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara adalah ketersediaan sumber daya alam dan tanahnya, mutu dan jumlah tenaga kerja, tingkat teknologi yang digunakan, barang modal yang tersedia serta sistem sosial dan sikap masyarakat.

Rumus :

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$PDRB_t$ = Produk Domestik Bruto Tahun Tertentu

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Bruto Tahun Sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitanya dengan meningkatnya barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat, maka semakin banyaknya barang dan jasa yang diproduksi berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya

kualitas sumber daya manusianya. Dengan modal manusia yang berkualitas maka kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom yaitu: Arsyad (2010):

a. Teori Neoklasik (Sollow Swan)

Menurut Arsyad (2010), ekonom yang menjadi perintis dalam pengembangan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang dimulai pada tahun 1950-an. Pada teori ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini perkembangan ekonomi pada dasarnya ditentukan pada faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan kumulasi modal) kemudian tingkat kemajuan teknologi.

b. Teori Harrod-Donar

Menurut Arsyad (2010), pada teori pertumbuhan ekonomi Harrod- Donar merupakan teori perluasan dan analisis dari dua orang ekonom sesudah Keynes yaitu Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar. Harrod mengemukakan teorinya dalam *Economic Journal* dengan judul *An Essay on Dynamic Theory*. Domar mengemukakan teori pertamanya pada *American Economic Review* dengan judul *Expansion and Employment* pada tahun 1947. Kegiatan ekonomi yang secara nasional dan masalah pada tenaga kerja.

c. Teori Schumpeter

Menurut Arsyad (2010), pada teori Schumpeter yang dikemukakan pada tahun 1934 dan pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Schumpeter menggambarkan teori ini tentang bagaimana proses pembangunan dan faktor utama dalam menentukan pembangunan dalam bukunya yang berjudul *Business Cycle*. Menurut Schumpeter, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu proses inovasi yang dilakukan inovator atau wiraswasta.

2.1.3 Produk Domestik Regional Domestik (PDRB)

Pengertian pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Fokus pertumbuhan ekonomi lebih ke perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) yang dihitung dengan menggunakan data. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu dan periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ialah tanda keberhasilan pembangunan prasyarat untuk pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran hasil kerja pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat dan bisa diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan suatu daerah. Perkembangan perekonomian bisa dihitung menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB), PDRB dipakai untuk membuktikan hasil kerja perekonomian kawasan. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat dan turunannya disajikan dengan menggunakan atas dasar harga konstan. Produk

Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total market value) dari barang akhir dan jasa (final goods and service) yang dihasilkan pada suatu perekonomian pada kurun waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit di seluruh wilayah. Produk Domestik Regional Bruto bertujuan untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini sama dengan jumlah nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa.

2.1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Tandelilin, 2017). Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (individual investors) dan investor institusional (institutional investors). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, (bank dan lembaga simpan-pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi (Tandelilin, 2017). Peran utama investasi adalah mengurangi jumlah pengangguran. Penanaman Modal Dalam Negeri ialah pengeluaran untuk pembelian barang produksi dan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian melalui investasi dalam negeri (Bela & Setiawina, 2016). Hal

utama dari penanaman modal dalam negeri adalah asal investor harus dari dalam negeri dan sumber modal juga harus berasal dari dalam negeri (Thian, 2021). Melalui kegiatan penanaman modal, masyarakat dapat terus meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerjanya, sehingga dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan (Panelewen et al., 2020). Investasi dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya modal di suatu daerah yang perekonomiannya rendah, oleh karena itu nilai investasi yang tinggi, dapat memperlancar proses pertumbuhan PDRB (Husna et al., 2020).

Potensi investasi PMDN yang cukup besar dimiliki oleh Jawa Timur. Berdasarkan data BKPM RI, realisasi PMDN Jawa Timur 2020 mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. IPM juga merupakan faktor penting dalam peningkatan nilai PDRB. Indeks pembangunan manusia adalah model pembangunan dengan tujuan guna meningkatkan pengetahuan penduduk agar lebih sejahtera dan berkecukupan secara ekonomi (Lestari & Fitriyati, 2013). BPS (2015) menjelaskan bahwa komponen yang diukur dalam IPM adalah pendapatan perkapita, angka harapan hidup, pendidikan dan tingkat buta huruf. IPM ialah indeks yang bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja pembangunan sosial ekonomi, menggabungkan pencapaian dari bidang, kesehatan, pendidikan, serta pendapatan riil perkapita yang disesuaikan (Budihardjo et al., 2020). Perkembangan IPM mampu menjelaskan level kesejahteraan yang dimiliki masyarakat (Bela & Setiawina, 2016). Kondisi sumber daya manusia dapat digunakan sebagai penentu untuk menunjukkan kemampuan dalam menggunakan

dan memanfaatkan sumber pertumbuhan ekonomi (Alexander, 2019). IPM Jawa Timur selalu menunjukkan kenaikan dikarenakan banyaknya program pemerintah dalam peningkatan SDM. Dengan adanya IPM yang terus meningkat ini dapat menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Jawa Timur membaik dimana berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan *representative*. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP (*United Nation Development Programme*). Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Menurut BPS (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar. Indeks Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Baeti, 2013).

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Harliyani dan Haryadi, 2016).

Ada empat komponen dalam proses mencapai tujuan pembangunan yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia (UNDP, 1995). Empat komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

a. Produktivitas

Manusia harus berupaya meningkatkan produktivitas serta berpartisipasi secara penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi

kebutuhan hidup. Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

c. Kestinambungan

Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga disiapkan untuk generasi mendatang. Segala sumber daya harus senantiasa dapat diperbarui.

d. Pemberdayaan

Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses pembangunan maka harus berpartisipasi dalam mengambil keputusan

4.1.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- a) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c) Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$IPM = \left(\sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \right) 100$$

dimana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan = Indeks Kesehatan

Pendidikan = Indeks Pendidikan

Pengeluaran = Indeks Pengeluaran

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS (2023), dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000).

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*) Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

- b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
1. Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
 2. Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

2.1.6.1 Teori Tingkat Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran di Indonesia yaitu :

a. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004). Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil.

b. Teori Keynes

Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

c. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret hitung” (misalnya,

dalam deret 1,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuan teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia”.

Teori Malthus ini menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

d. Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

Analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat

apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis. Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru ini konsep “kelas buruh “ tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi. Dari uraian diatas maka dapat kita lihat lagi bahwa dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi kearah sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasasaja, maka akan mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit dan hal pemasaran, bisa saja perusahaan kecil tersebut mengalami kebangkrutandan tidak lagi mampu mengkaji pekerjaanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu baroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran.

2.2 Studi Terkait

Penelitian yang di lakukan ooleh Rawung et al (2022) dengan judul penelitian Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman

Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing Terhadap Sulawesi Utara.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan adalah linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing baik secara simultan ataupun parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Rizky et al (2022) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Investasi Luar Negeri dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia Tahun 2017-2021. Penelitian dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berjenis time series berkisar antara tahun 2017-2021. Hasil kajian yang ditemukan bahwa Investasi Luar Negeri atau (PMA) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB, sedangkan Investasi Dalam Negeri atau (PMDN) memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015, Jenis data menggunakan data sekunder yang

diperoleh dari BPS Indonesia dan juga jurnal sebagai pendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan model data panel.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanthi (2017) dengan judul Pengaruh IPM Dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh IPM dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, menganalisis pengaruh IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan menganalisis pengaruh tidak langsung IPM, PMDN dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah pengamatan 45 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (3) IPM tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi dan PMDN tidak berpengaruh secara

tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al (2020) dengan judul Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan PMDN, PMA, Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Jambi dan untuk menganalisis pengaruh PMDN, PMA, Ekspor dan Impor terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi. Model analisis yang digunakan adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan impor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

VI. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh PMDN, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi 34 provinsi di Indonesia tahun 2010-2021.